

EVALUASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU (Studi Kasus di Kabupaten Kampar)

Oleh : Nina Kartini

Nina.kartini4527@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The creation of food security conditions is fundamental in realizing human development. However, the food security still poses various problems that have not been resolved until now, where the condition of food vulnerability is very related to food security. Food security Policy is one solution to overcome food vulnerability problem. Riau Province, one of the provinces that issued a food security policy with the formation of regional regulation of Riau Province No. 13 of 2018 about food security makes this research focus on highlighting the implementation of Food security Policy. The implementation of the policy in this case is the food security Service of Riau Province and the Food security Service Kampar District, which is examined by using the Terori evaluation policy according to Dunn (2018:115) and Jones quoted by Kawengian & Rares (2015). The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. In the final process, the results showed the implementation of the food security policy that has not been optimal encountered various constraints in the implementation of food security policy are: communication, regulation, community economy, and access.

Keyword: Policy Evaluation , Food Security, and Food Vulnerability.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan masih menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai daerah-daerah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ketahanan pangan didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan diukur berdasarkan persentase indeks ketahanan pangan per daerah. Provinsi Riau melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2019)

didasari oleh berbagai faktor yaitu:

1. Tingginya presentase konsumsi serelia
2. Tingginya presentase Penduduk miskin
3. Tingginya presentase rumah tanpa air bersih
4. Tingginya Stunting
5. Tingginya presentase rumah tanpa akses listrik

Kelima point diatas menjadi faktor dari terjadinya kerentanan pangan di Provinsi Riau. Selanjutnya dalam rangka merealisasikan ketahanan pangan di Provinsi Riau, Gubernur Riau membuat regulasi mengenai program aksi yang menjadi sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau.

Selanjutnya dalam rangka merealisasikan ketahanan pangan di Provinsi Riau, Gubernur Riau membuat regulasi mengenai program aksi yang menjadi sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 tentang ketahanan Pangan, dimana pada pasal 2 menjelaskan mengenai lingkup ketahanan pangan di Provinsi Riau yaitu:

1. Perencanaan Ketahanan Pangan;
2. Ketersediaan Pangan;
3. Penganekaragaman Pangan;
4. Keamanan Pangan;
5. Pengawasan dan pembinaan;
6. Peran serta masyarakat;
7. Kerjasama; dan
8. Sanksi administrasi.

Lingkup ketahanan pangan di Provinsi Riau didasari atas kedelapan *point* diatas untuk memperkuat kondisi ketahanan pangan di Provinsi Riau dan pada kajian ini berfokus pada *point* kedua yaitu mengenai ketersediaan pangan yang mencakup beberapa sub point, antara lain: penyediaan dan cadangan pangan, keterjangkauan pangan dan sistem informasi pangan. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Produksi dan Kebutuhan Pangan Provinsi Riau Tahun 2016-2017

Komoditas Pangan	Tahun			
	2016		2017	
	Produksi	Kebutuhan	Produksi	Kebutuhan
Beras	234.356	679.351	229.468	695.752
Jagung	32.850	35.105	30.768	30.560
Kedelai	2.654	41.606	1.119	42.611
Kc. Tanah	913	8.516	798	7.390
Kc. Hijau	650	7.606	448	6.591
Ubi Jalar	4.904	11.702	4.802	11.984
Ubi Kayu	105.992	63.710	124.509	55.460
Sagu	326.755	26.654	326.355	27.297
Buah-buahan	199.140	174.226	193.401	178.432
Sayuran	199.095	299.695	243.962	306.930
Daging	65.287	53.958	70.909	81.892
Telur	6.273	55.908	6.453	57.258
Ikan	321.507	205.431	541.253	178.831

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2019*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa produksi pangan di Provinsi Riau tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Artinya, produksi pangan yang tidak mencukupi atas kebutuhan pangan di Provinsi Riau membutuhkan cara lain untuk pemenuhannya. Selain itu, pertumbuhan dari beberapa produksi komoditas pangan di Provinsi Riau semakin menurun dan tidak sejalan dengan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Untuk menutupi kekurangan produksi pangan di Provinsi Riau, kebutuhan pasokan dalam rangka memenuhi pangan sangat diperlukan. Berikut adalah tabel pasokan pangan Provinsi Riau dari tahun 2016-2017:

Tabel 1.2 Pasokan Komoditas Pangan di Provinsi Riau Tahun 2016-2017 (Ton)

No.	Komoditas Pangan	Tahun	
		2016	2017
1.	Beras	605.414	611.468
2.	Jagung	9.340	9.412
3.	Kedelai	73.784	73.969
4.	Kc. Tanah	15.086	15.162
5.	Kc. Hijau	11.548	11.554
6.	Ubi Jalar	6.907	8.081
7.	Ubi Kayu	103.672	103.723
8.	Sagu	-	-
9.	Buah-buahan	178.925	179.820
10.	Sayuran	319.307	319.370
11.	Daging	14.774	15.513
12.	Telur	55.691	55.734
13.	Ikan	67.474	67.507

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2019*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pasokan pangan di Provinsi Riau semakin meningkat. Ketergantungan Provinsi Riau terhadap pasokan pangan semakin meningkat. Provinsi Riau belum mampu mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri. Langkah strategis yang sangat serius harus disikapi oleh pemerintah Provinsi Riau untuk menghindari Provinsi Riau berada pada kondisi rentan pangan. Peningkatan produksi pangan dengan menggunakan sistem maju dapat menghindarkan kondisi kekurangan pangan di Provinsi Riau. Ketidaktercapaian tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan, menunjukkan belum terlaksananya dengan baik kegiatan dalam rangka mewujudkan Provinsi

Riau dengan kondisi ketahanan pangan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan kondisi rentan pangan masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah Kecamatan Rentan Pangan di Provinsi Riau Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec.	Kecamatan Rentan Pangan	(%)
Indragiri Hulu	15	7	46,7 %
Indragiri Hilir	14	8	57,1%
Pelalawan	12	2	16,7%
Siak	14	2	14,3%
Kampar	21	12	57,2%
Rokan Hulu	16	7	43,8%
Rokan Hilir	18	11	61,1%
Kepulauan Meranti	9	7	77,8%
Bengkalis	8	4	50%
Pekanbaru	12	0	0
Dumai	7	0	0
Kuantan Singingi	15	0	0

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2019*

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa persentase kawasan rentan pangan tertinggi yaitu Kabupaten Meranti. Namun, Kabupaten/kota rentan pangan tertinggi yang memiliki jumlah kecamatan rentan pangan tertinggi yaitu Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar termasuk dalam kawasan kecamatan tertinggi kerentanan pangan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Kampar, Karena, pada tahun 2015 Kabupaten Kampar mendapatkan penghargaan nasional sebagai daerah pertanian terbaik. Pada dasarnya Kabupaten Kampar dapat di jadikan sebagai pedoman daerah lain dalam menghasilkan pertanian terbaik. Namun, dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan hasil pertanian yang baik belum tentu dapat menjadikan Kabupaten Kampar menjadi daerah yang bebas rentan. Fakta yang lainnya mengenai pangan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu perbandingan produksi dan kebutuhan beberapa komoditas pangan di Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Produksi dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2018 (Ton)

Komoditas Pangan	2017		2018*	
	Produksi	Kebutuhan	Produksi	Kebutuhan
Beras	18.207	86.948	25.778,1	90.990,89
Jagung	3.603	166	13.403,5	4.402,62
Sayuran	52.669	40.537	32.259,4	28.800,57
Buah-buahan	52.073	22.891	40.403,6	14.047,39
Daging	1.586	1.165	4.985,9	1.346,29

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2019*

Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa komoditas pangan yang paling tidak seimbang yaitu komoditas beras, dan tingkat kebutuhan pangan di Kabupaten Kampar semakin meningkat. Namun, terjadi penurunan produksi pada komoditas sayuran dan buah-buahan. Ketidak seimbangan antara produksi dan tingkat kebutuhan pangan dapat meningkatkan peluang kerentanan pangan pada suatu daerah. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Riau dalam penanggulangan kondisi rentan pangan di berbagai daerah terutama di Kabupaten Kampar. Kompleksitas permasalahan ketahanan pangan yang belum mencapai hasil yang optimal mulai dari daerah, provinsi hingga nasional, dapat menjadi ancaman ketahanan pangan sebagaimana dilansir dalam publikasi CNBC Indonesia (2019) terdapat 88 wilayah yang mengalami kerawanan pangan skala nasional. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau (Studi Kasus di Kabupaten Kampar)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di paparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di provinsi Riau khususnya di kabupaten Kampar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya kepustakaan bidang keilmuan Administrasi Publik khususnya dalam bidang kebijakan publik. Serta kajian ketahanan pangan dapat memperkaya lingkup kajian. Selain itu, membangun teori yang digunakan dalam penelitian dengan evaluasi yang terjadi dilapangan sehingga kebijakan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masukkan untuk bersama menciptakan Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar yang lebih maju dan optimal dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dengan melihat manfaat dari kebijakan tersebut. Selanjutnya pada sektor masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar dapat merasakan kebijakan ketahanan pangan agar tercapainya stabilitas pangan di Provinsi Riau.

2. KONSEP TEORI

2.1 Kebijakan

Kebijakan publik sering dianggap sama dengan hukum oleh beberapa kalangan. Padahal, konteks kebijakan publik dan hukum berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk memberikan pemahaman mengenai

defenisi kebijakan publik, berikut akan dibahas makna dari kebijakan publik menurut para ahli. Secara lebih luas menurut Robert Eyestone dikutip oleh Winarno (2014:20) kebijakan publik didefenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Selanjutnya Menurut Nugroho (2017:72) Kebijakan publik merupakan proses politik diantara negara dan masyarakat, dimana administrasi publik merupakan lembaga yang melakukan proses formal, dalam artian pemutusan penetapan, dan proses manajerial, yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan.

Kebijakan publik disusun berdasarkan atas proses yang kompleks dan melibatkan berbagai variabel untuk mengkajinya. Tahap-tahap kebijakan publik berbeda-beda urutannya menurut beberapa ahli, berikut ini tahapan kebijakan publik menurut Dunn yang dikutip oleh Winarno (2014:35-37) yaitu sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini, masalah-masalah yang masuk terlebih dahulu ke dalam agenda kebijakan, selanjutnya pada akhirnya diproses ataupun ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang masuk kedalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah didefenisikan dan dicari pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Setelah melalui proses perumusan akhirnya ditentukan alternatif kebijakan yang didukung oleh mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang diambil sebagai langkah pemecahan masalah selanjutnya diimplementasikan, dilaksanakan sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah dilakukan evaluasi kebijakan.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah proses pengambilan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan publik yang tujuannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tahapan-tahapan kebijakan secara garis besar dimulai dari formulasi kebijakan, dimana kebijakan dirumuskan dan ditentukan. Selanjutnya implementasi kebijakan, dimana kebijakan dilaksanakan. Terakhir dalam tahapan kebijakan publik yaitu evaluasi kebijakan, dimana kebijakan yang telah dilaksanakan dinilai dan dilihat keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan tersebut.

2.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan maka harus diimplementasikan oleh para aktor kebijakan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini, implementasi menjadi bagian penting dalam kebijakan publik sebagaimana menurut Nugroho (2017:728) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dengan bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan kebijakan publik tersebut.

Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana menurut Edward III yang dikutip oleh Suparno (2017:16) yang mengidentifikasi adanya 4 (empat) faktor determinan utama yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu: (1) komunikasi (*communication*), (2) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), (3) sumberdaya (*resources*), dan (4) disposisi (*disposition*). Karakter implementor dapat mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana menurut Ripley yang dikutip oleh Suparno

(2017:24) ia merinci sejumlah karakter lembaga pelaksana yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) kompetensi dan besarnya staf, (2) tingkat kendali hirarkhi pengambilan keputusan, (3) dukungan politik terhadap lembaga pelaksana, (4) tingkat keterbukaan komunikasi dalam implementasi, dan (5) keterkaitan formal dan informal lembaga pelaksana dengan pembuat kebijakan dan penegak hukum.

Selanjutnya, faktor mempengaruhi hasil implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang kuti oleh Suparno (2017:26), yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi dan penggunaan paksaan, (4) disposisi implementor, (5) karakter lembaga pelaksana, dan (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Proses implementasi kebijakan tidak hanya sekedar pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, berbagai permasalahan muncul dalam implementasi kebijakan sebagaimana menurut Makinde yang dikutip oleh Kasmad (2018:83) permasalahan yang muncul dalam proses implementasi antara lain adalah (1) Kelompok sasaran (*target beneficiaries*) tidak terlibat dalam implementasi program, (2) Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, (3) Adanya korupsi, (4) Sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas yang rendah, (5) Tidak adanya koordinasi dan monitoring.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks dan menentukan berjalannya kebijakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, implementasi kebijakan bukan hanya sekedar pelaksanaan kebijakan, lebih dari itu implementasi kebijakan memiliki cakupan yang luas. Pada proses implementasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dikemukakan oleh para ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta berbagai permasalahan yang ditemukan akibat dari implementasi kebijakan.

2.3. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik berdasarkan susunan kebijakan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Namun, proses evaluasi kebijakan menurut Winarno (2014:228) tidak dapat dipisahkan dalam setiap tahapan kebijakan karena evaluasi kebijakan dibuat oleh pembuat kebijakan perlu dilakukan penenilaian sejauh manakah efektifitas suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Suatu kebijakan penting untuk dievaluasi untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi.

Selain itu Menurut Jones dikutip oleh Kawengian & Rares (2015) bahwa evaluasi kebijakan dimaknai dari bagaimana evaluasi kebijakan itu dikategorikan dalam pemerintahan, yaitu mengarah kepada “program kepada pemerintah”. Sementara itu program yang bersifat individual dikembalikan kepada pemerintah untuk pembahasan dan pertimbangan bagi pengembangan selanjutnya.

Jones dikutip oleh Kawengian & Rares (2015) mengemukakan bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk 3 tujuan, yaitu:

- a. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politis). Dilakukan untuk melihat apakah kebijakan memberikan manfaat. Dapatkah ini ditafsirkan untuk membuka peluang bagi *re-election*, untuk mendapatkan dukungan media, atau untuk mendapatkan sumbangan kampanye.
- b. *Organizational evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional). Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan yang dilakukan, melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana. Apakah manfaat bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah kebijakan yang dilakukan, mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut.

- c. *Substantive evaluation* (evaluasi yang substantif atau bersifat nyata). Yaitu evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta apa dampak kebijakan tersebut bagi persoalan yang dituju.

Selanjutnya, kriteria untuk rekomendasi kebijakan Menurut Dunn (2018:115) terdapat enam kriteria, yaitu:

- a. *Efektivitas*
- b. *Efisiensi*
- c. *Adequacy*
- d. *Equity*
- e. *Responsiveness*
- f. *Appropriateness*

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan publik yang penting. Karena, dalam evaluasi kebijakan, dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan. Untuk melihat kesenjangan antar harapan dan kenyataan tersebut maka dilakukanlah evaluasi kebijakan, dalam hal penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan ada beberapa indikator dalam hal pengukurannya. Kajian evaluasi kebijakan pada penelitian ini secara terkhusus mengarah kepada kebijakan ketahanan pangan.

2.4. Ketahanan Pangan

Evaluasi kebijakan pada penelitian ini, mengenai kebijakan ketahanan pangan yang merupakan prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia pada saat ini maupun masa mendatang. Karena itu, ketahanan pangan memerlukan peran aktif dari berbagai *stakeholder* baik pemerintah, masyarakat, para ilmuwan, maupun swasta. Menurut Winarno (2014:288) ketahanan pangan didefinisikan sebagai keadaan dimana semua penduduk memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk mendapatkan gizi yang cukup bagi kehidupan yang produktif dan sehat.

Konsep ketahanan pangan sebagai

kebijakan publik, menurut Arifin dikutip oleh Winarno (2014:302) tonggak ketahanan pangan terdiri atas ketersediaan atau kecukupan dan aksesibilitas bahan pangan oleh anggota masyarakat. Konsep ketahanan pangan menurut Hardiansyah dikutip oleh Wibowo (2017:154) ketahanan pangan merupakan sistem yang terintegrasi, terdiri atas tiga subsistem yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Pembangunan dari ketahanan pangan memerlukan harmonisasi antara ketiga subsistem untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan yang asalnya dari produksi, cadangan dan impor pangan. Distribusi pangan dilakukan untuk menjamin stabilitas dari harga pangan. Sedangkan konsumsi pangan dilakukan untuk menjamin kebutuhan rumah tangga mengonsumsi kecukupan pangan, baik jumlahnya maupun kualitas pangannya.

Ketahanan pangan menurut Tambunan dikutip oleh Wibowo (2017:156) faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu:

1. Penguasaan lahan
2. Infrastruktur
3. Teknologi keahlian dan wawasan
4. Dana
5. Lingkungan fisik/iklim
6. Relasi kerja
7. Ketersediaan input lainnya

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan adalah aspek penting yang menyangkut kebutuhan vital manusia. Kebijakan ketahanan pangan adalah sebuah kebijakan strategis nasional yang dalam pelaksanaannya agar optimal dibentuk menjadi kebijakan ketahanan pangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dimana menurut Suyitno (2018:90) dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan,

posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian. Sesungguhnya subjek penelitiannya relatif kecil. Namun demikian, fokus dan variabel yang diteliti cukup luas. Penelitian dengan judul evaluasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Riau (studi kasus di Kabupaten Kampar) mengambil salah satu kabupaten di Provinsi Riau guna memfokuskan penelitian pada salah satu lokus penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kampar, penetapan lokasi penelitian berdasarkan kondisi ketahanan pangan dengan kecamatan terbanyak yang berada pada kondisi rentan pangan. Dengan *key informan* adalah dapat dilihat dibawah ini:

1. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar
3. Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Adapun selanjutnya dari informasi yang disampaikan *key informan* merujuk pada informan-informan selanjutnya, untuk mengarah pada fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dianalisis dengan model analisis Huberman dan Miles yang dikutip oleh Sugiono (2017:240-246).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau (Studi Kasus di Kabupaten Kampar)

Evaluasi kebijakan ketahanan pangan dalam penelitian menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat baik dari segi ketersediaan, pemanfaatan, dan distribusinya. Penelitian ini dilatarbelakangi atas kondisi ketersediaan pangan yang tidak sebanding dengan konsumsi pangan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 Tentang ketahanan Pangan Pasal 9-24 menjelaskan secara rinci mengenai ketersediaan dan cadangan pangan.

Pelaksanaan Kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Riau perlu dilakukan evaluasi karena mengingat kondisi kerentanan pangan

yang masih belum dapat diatasi sejak diberlakukannya kebijakan. Penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan pendekatan dua teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018:115) dan Jones dikutip oleh Kawengian & Rares (2015) dengan indikator efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, *organizational*, dan *substantive*, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Efektifitas

Efektifitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan sebagaimana menurut Dunn (2018:115) dan alternatif kebijakan mencapai hasil yang diharapkan sebagaimana menurut Nugroho (2017:322). Dalam penelitian ini, efektifitas dimaksudkan yaitu penilaian ketercapaian tujuan ketersediaan pangan pada kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Riau dan mencapai hasil yang diharapkan atas dilaksanakannya kebijakan ketahanan pangan.

Dalam hal efektifitas pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan. Dari hasil penelitian, pelaksanaan belum mencapai hasil yang maksimal, kondisi kerentanan pangan masih terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Kampar. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar mengesahkan untuk menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan, dalam hal melaksanakan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan Ketahanan pangan mengadakan binaan kepada desa sasaran, desa binaan ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar

Upaya yang telah dilaksanakan dalam hal pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, belum mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 13 Tahun 2018 Tentang ketahanan Pangan pada Pasal 9 ayat 3, dimana upaya kebijakan yang mengarah pada peningkatan ketersediaan pangan tidak di realisasikan dengan kegiatan yang mendukung upaya tersebut. Ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ketahanan pangan yang belum mencapai tujuan dan belum memperoleh keberhasilan dalam pelaksanaannya. Perlu untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sehingga kerentanan pangan dapat segera teratasi di Kabupaten Kampar.

2. Kecukupan

Kecukupan yang dimaksud melihat tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan permasalahan publik sebagaimana menurut Dunn (2018:115) dan tingkat efektifitas yang memuaskan kebutuhan atau kesempatan yang menimbulkan permasalahan sebagaimana menurut Nugroho (2017:322) dalam penelitian ini adalah permasalahan ketahanan pangan harus mampu di pecahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar beserta instansi terkait lainnya agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat tercapai.

Kecukupan pangan di Kabupaten Kampar berdasarkan data, jika hanya mengandalkan produksi pangan daerah tanpa pasokan pangan, Kabupaten Kampar berada pada permasalahan yang cukup serius. Kondisi ini, jika terus berlanjut dan tidak di atasi dengan serius oleh berbagai *stakeholder* akan semakin memburuk dan jumlah kecamatan rentan pangan akan semakin bertambah dari 12 kecamatan yang pada saat ini menjadi kecamatan rentan pangan. Karenanya, pertanian masyarakat di Kabupaten Kampar masih tradisional dan tidak dikelola dengan baik sehingga padi bertumbuh dengan rumpuk-rumputan dan perkebunan. Sebagian besar lahan bersebelahan dengan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut menyebabkan sawah tidak berproduksi dengan baik. Selain itu,

sistem perairan sawah menjadi permasalahan selanjutnya di Kabupaten Kampar, masyarakat hanya dapat menanam padi satu kali per tahun.

kecukupan sebagai indikator evaluasi kebijakan ketahanan pangan ini dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap permasalahan kerentanan pangan belum dapat dipecahkan, selain itu kecukupan terhadap produksi tidak sebanding dengan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kampar, maka dari itu evaluasi kebijakan diperlukan untuk memperbaiki penyediaan pangan di Kabupaten Kampar.

3. Pemerataan

Pemerataan yang dimaksud untuk melihat manfaat dan biaya kegiatan yang terdistribusi secara proporsional sebagaimana menurut Dunn (2018:115) dan pemerataan terhadap distribusi manfaat kebijakan sebagaimana menurut Nugroho (2017:322) dalam penelitian ini untuk menilai manfaat dari diterapkannya kebijakan ketahanan pangan dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional dan merata untuk masyarakat agar terciptanya ketahanan pangan di Provinsi Riau khususnya di kabupaten Kampar.

Pemerataan distribusi dalam hal ini menyangkut ketersediaan pangan di daerah-daerah tersalurkan secara merata agar tidak adanya daerah yang menderita kerentanan pangan. Dalam hal pemerataan distribusi anggaran, belum terlihat merata karena adanya ketidak sesuaian antara keharusan daerah yang mendapatkan anggaran, namun jumlah anggaran yang terealisasi memang didistribusikan dengan jumlah yang sama. Dalam hal ini, perlu adanya evaluasi dalam hal pemerataan anggaran agar tujuan dari kebijakan ketahanan pangan tercapai. Selain itu, dalam mewujudkan pemerataan ketersediaan pangan di Kabupaten Kampar

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar harus memperhatikan amanat kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

4. Responsivitas

Responsivitas yang dimaksud hasil dari kebijakan menunjukkan kepuasan, sebagaimana keinginan target group sebagaimana menurut (Dunn, 2018) dan seberapa jauh kebijakan mampu memuaskan kebutuhan kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan sebagaimana menurut Nugroho (2017:322) dalam penelitian ini adalah kepekaan pemerintah terhadap permasalahan kerentanan pangan di Provinsi Riau. Bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan permasalahan kerentanan pangan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar.

bahwa kedaulatan pangan seharusnya menjadi salah satu hal yang harus diperhataikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Dalam penelitian ini, Responsivitas pemerintah dalam menangani permasalahan kerentanan pangan di Kabupaten Kampar masih belum maksimal, observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang tidak memiliki hak otonom dalam penanganan daerah rentan pangan, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar yang tidak cekatan dalam menangani permasalahan di Kabupaten Kampar. Untuk itu, pentingnya evaluasi untuk perbaikan sistem kinerja dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik.

5. Organisational Evaluation

Organizational evaluation yang dimaksud kebijakan yang dilaksanakan melahirkan dukungan antar badan pelaksana kebijakan, dan mengarahkan perluasan yang lebih lanjut bagi badan-badan yang terlibat sebagaimana menurut Jones yang dikutip oleh Kawengian & Rares (2015). Dalam penelitian ini adalah

dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, bagaimana koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar

Hubungan antar organisasi dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan menunjukkan bahwa keberlangsungan koordinasi yang belum baik, hal ini, terlihat dari pernyataan berbeda dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar. Perbaikan pada komunikasi antar instansi diperlukan untuk menjalankan kebijakan ketahanan pangan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan pada indikator organisasi diperlukan agar perbaikan dapat segera dilaksanakan demi tercapainya tujuan kebijakan ketahanan pangan.

6. Substantive Evaluation

Substantive evaluation (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata), yang dimaksud kebijakan yang telah dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan baik secara hukum maupun detail kebijakan yang ingin dicapai bagi persoalan yang dituju sebagaimana menurut Jones yang dikutip oleh Kawengian & Rares (2015) dalam penelitian ini adalah bentuk kebijakan ketahanan pangan dan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan terhadap permasalahan kerentanan pangan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar.

Substantive evaluation dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yang pada penelitian ini lokus penelitian yaitu Kabupaten Kampar terjadi berbagai dinamika, seperti tidak tercapainya tujuan, tidak tepatnya bantuan, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar, Kecamatan sasaran Kebijakan Ketahanan pangan, dan Desa sasaran

Kebijakan ketahanan pangan. Hal ini penting untuk dievaluasi ketika berlangsung nya kebijakan, agar pelaksanaan berupa bantuan ataupun berbagai upaya dalam mengatasi ketahanan pangan segera terselesaikan sehingga dapat segera diperbaiki.

4.2. Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau (Studi Kasus di Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yang belum mencapai tujuan, tentunya menghadapi berbagai hambatan, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan ketahanan pangan sebagaimana berikut ini:

1. Komunikasi

Faktor komunikasi sebagaimana menurut Edward III merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang berlangsung baik dapat mendukung dan menjalankan kebijakan sebagaimana menurut Kasmad (2018:75) adalah Komunikasi yang dimaksudkan yaitu penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut.

komunikasi antar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar berlangsung kurang baik, hal ini terlihat dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar sedang melaksanakan kegiatan sesuai dengan renstra dan tidak ada *sharing budgeting* dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Dari kedua pernyataan yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan yaitu faktor komunikasi. Perlu untuk dilakukan perbaikan komunikasi antar instansi agar mengarah pada tujuan yang sama dan mencapai hasil yang telah ditetapkan, sehingga

permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar dapat terselesaikan.

2. Regulasi

Regulasi dalam hal pelaksanaan kebijakan menjadi landasan yang sangat kuat karena dengan adanya regulasi, maka jalannya kebijakan memiliki pedoman dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Faktor regulasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan sebagaimana menurut Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan serta Ghana yaitu ketidakjelasan tujuan kebijakan, dapat menghambat implementasi kebijakan.

Kabupaten Kampar belum memiliki regulasi kebijakan ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar melaksanakan urusan ketahanan pangan berdasarkan Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar dalam melaksanakan urusan ketahanan pangan belum memiliki pedoman yang memperkuat terselenggaranya kebijakan. Belum adanya kebijakan menjadi salah satu penghambat pelaksanaan kebijakan, kewenangan dalam mengatasi ketahanan pangan menjadi terhambat dengan tidak adanya regulasi yang mengatur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar.

3. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat yang baik dapat meningkatkan taraf hidup, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana menurut Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa faktor sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Seperti halnya kebijakan ketahanan pangan, perekonomian menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan, agar mencapai tujuan ketahanan pangan.

Kondisi masyarakat Kabupaten Kampar dengan perekonomian masyarakat yang berada pada garis kemiskinan menjadi salah satu penghambat dari pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar. Untuk itu pembinaan yang intens kepada masyarakat dapat menjadi solusi permasalahan perekonomian masyarakat. Analisis terhadap strategi khusus yang akan dilaksanakan dalam menangani permasalahan perekonomian masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masalah perekonomian dapat segera terselesaikan.

4. Akses

Kebijakan yang dilaksanakan tentunya harus di dukung dengan adanya akses yang mendukung. Berbeda dengan faktor implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, Van Meter dan Van Horn, Ghana, dll, faktor akses belum dikemukakan sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Tambunan disebutkan bahwa infrastruktur dapat mempengaruhi ketahanan pangan di suatu daerah. Pelaksanaan Kebijakan ketahanan pangan tanpa didukung oleh akses yang memadai akan memperlambat proses distribusi pangan kepada masyarakat.

Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu dari segi akses dan topografi. Dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti ke daerah sasaran rentan pangan di kecamatan Kampar Kiri Hulu, peneliti melihat secara langsung sungai besar yang memisahkan antara Kantor Camat Kampar Kiri Hulu dengan desa-desa sasaran kebijakan ketahanan pangan yang harus di lalui dengan sampan dan memakan waktu hingga 2 jam perjalanan. Akses yang tidak memadai di Kecamatan Kampar Kiri Hulu menunjukkan kondisi ketahanan pangan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu berada pada kondisi paling rentan di Kabupaten Kampar.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Riau belum berjalan sesuai tujuan, hal tersebut berdasarkan atas penilaian dari indikator-indikator sebagai berikut: (a) efektifitas; kebijakan ketahanan pangan belum mencapai tujuan dikarenakan sasaran yang tidak tepat dalam pelaksanaannya, selain itu pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan belum mencapai keberhasilan, (b) kecukupan; upaya dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat belum mampu memecahkan permasalahan kerentanan pangan di masyarakat hal itu dilihat dari produksi tidak sebanding dengan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Kampar, (c) pemerataan; pemerataan dalam penelitian ini dilihat dari aspek distribusi dan biaya, distribusi bantuan mencakup kecamatan-kecamatan yang mengalami kerentanan pangan, dan dengan jumlah bantuan yang merata tiap daerahnya. (d) responsivitas; pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang tidak memiliki hak otonom dalam penanganan daerah rentan pangan, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar yang tidak cekatan dalam menangani permasalahan di Kabupaten Kampar, (e) *organizational*; pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar tidak terkoordinasi dengan baik, hal ini dikarenakan hubungan antar organisasi yang kurang berkomunikasi dengan dengan baik dalam melaksanakan urusan ketahanan pangan, (f) *substantive*; kebijakan ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbagai upaya. bentuk pemberian bantuan dilaksanakan dengan bantuan langsung kepada sasaran, dan dalam penyediaan informasi dilakukan melalui *web*, penyediaan informasi pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Kampar tidak *up date* dan sangat minim informasi.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar adalah: (a) Komunikasi; pelaksanaan komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar menyebabkan tujuan dari kebijakan belum mencapai tujuan kebijakan ketahanan pangan, (b) regulasi; peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang ketahanan pangan belum terealisasi sehingga ketercapaian ketahanan pangan belum terwujud, (c) perekonomian masyarakat; rendahnya pendapatan masyarakat mempengaruhi daya beli masyarakat di Kabupaten Kampar, dan (d) akses; keterbatasan akses mempengaruhi distribusi pangan ke berbagai desa-desa di Kabupaten Kampar.

5.2 Saran

1. Analisis penentuan sasaran kebijakan sebelum di laksanakan kebijakan ketahanan pangan diperlukan agar tepatnya sasaran kebijakan. Selanjutnya, peningkatan ketersediaan pangan di Kabupaten Kampar dapat berhasil apabila pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang ketahanan pangan sesuai dengan pasal 9 ayat (3). Kepekaan dalam menjalankan kebijakan dibutuhkan adanya strategi pelaksanaan yang matang dapat membantu mempercepat penyelesaian permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kampar. Selain itu, Perbaikan pada komunikasi antar instansi dalam urusan ketahanan pangan, dalam hal ini koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar. Dan penyediaan informasi yang *up to date* pada *web* resmi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar agar terciptanya transparansi data yang tersedia.
2. Faktor penghambat yang paling dominan dalam pelaksanaan kebijakan

ketahanan pangan di Kabupaten Kampar dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antar instansi, pembuatan peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang ketahanan pangan dapat mempercepat penanggulangan kerentanan pangan, selain itu, pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat harus dilaksanakan, serta pembangunan infrastruktur sebagai akses menuju daerah-daerah yang sulit terjangkau dalam menanggulangi kerentanan pangan di Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dachi, R. A. (2017). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan* (Cetakan I). Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth Edit). New Work and London: Routledge.
- Hayat, Nuh, M., Fanani, A. F., Kurtariningsih, A., Hamid, A., Pujowati, Y., ... Iqbal. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik*. (Hayat, Ed.) (Cetakan I). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. (M. Masson, Ed.) (Sixth Edit). California, America: Sage Publisher. Retrieved from <https://lcn.loc.gov/2017000973>
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (Edisi ke-6). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sardjo, S., Darmajanti, L., & Boediono, K. C. (2016). *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS): Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program* (Edisi I). Jakarta: IKAPI DKI Jakarta.
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. (Dahlan, Ed.) (Cetakan I). Makassar: Cv. Sah Media.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. (S. Y. Ratri, Ed.) (Cetakan 1). Bandung: CV.Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Renbang)*. (Hafit, Ed.). Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. (A. Tanzeh, Ed.). Malang: Akademia Pustaka.
- Taufiqurrokhman. (2014). *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Vedung, E. (2017). *Public Policy and Program Evaluation*. London and New York: Routledge.
- Wibowo, T. (2017). *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk & Ketahanan Pangan*. (R. Kurniawan & T. Wibowo, Eds.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. (T. Admojo, Ed.) (Cetakan Ke). Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Jurnal:

- Dini Maharani Arum Rimadianti, Arief Daryanto, Y. F. B. (2016). Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Gizi Pangan*, 11(1), 75–82.
- Doocy, S., Tappis, H., Lyles, E., Witiw, J., & Aken, V. (2017). Emergency Food Assistance in Northern Syria: An Evaluation of Transfer Programs in Idleb Governorate, 38(2), 240–259. <https://doi.org/10.1177/037957211770075>

- Kawengian, D. D. V., & Rares, J. J. (2015).
valuasi Kebijakan Pencegahan dan
Pemberantasan Perdagangan Manusia
(Trafficking) Terutama Perempuan dan
Anak di Kabupaten Minahasa Selatan
Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal*
"Acta Diurna," IV(5).
- Pillaca-medina, S., & Chavez-dulanto, P. N.
(2017). How effective and efficient are
social programs on food and nutritional
security? The case of Peru : A review,
(May), 1–22.
<https://doi.org/10.1002/fes3.120>
- Ramulu, C. B. (2014). Governance of
Poverty Alleviation Policies in India :
A Study of Food Security Policies to
Rural Poor.
<https://doi.org/10.1177/2321024914534049>
- Resti, Y. R. (2015). *Pendekatan Model
Fungsi Transfer Multi Input Untuk
Analisis Hubungan Antara Luas Panen
dan Luas Tambak Tanam dengan
Produksi Bawang Merah di Jawa
Tengah*. Universitas Diponegoro.

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
Tentang Pangan.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13
Tahun 2018 Tentang Ketahanan
Pangan.

Dokumen:

- Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Riau Tahun 2019-2022
- Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Riau Tahun 2018-2019
- Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Riau Tahun 2018
- Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Provinsi Riau Tahun 2018
- Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022